



MENYAPA WARGA DI CFD: Presiden Joko Widodo bersepeda saat Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/1). Presiden bersepeda dari Istana Negara hingga Dukuh Atas dan menyapa warga yang berolahraga.

KR-Antara/Reno Esnir

RUMAH RUSAK AKIBAT GEMPA

Bupati Cianjur Pastikan Dibantu

CIANJUR (KR) - Bupati Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Herman Suherman, memastikan seluruh rumah yang rusak akibat gempa bumi mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga warga yang rumahnya belum terdata dapat melapor ke aparat desa setempat.

"Kalau belum terdata sama sekali silakan menghubungi aparat desa setempat atau dinas penghubung yang sudah ditempatkan di masing-masing desa dan kecamatan terdampak ringan, sedang dan berat," katanya di Cianjur, Minggu (15/1).

Hingga saat ini, pihaknya bersama BNPB masih melakukan verifikasi hasil dari tim survei ter-

hadap rumah warga yang rusak akibat gempa 5.6 magnitudo yang mengguncang Cianjur, Senin (21/11) 2022 dengan hitungan sementara sekitar 71 ribu unit rusak.

Selanjutnya, kata Bupati, setelah menerima data rumah rusak dari BNPB, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan segera diserahkan kembali ke BNPB untuk segera ditindaklanjuti agar warga segera mendapat bantuan dari pemerintah.

Pihaknya segera mengumumkan hasil verifikasi dan pendataan secara resmi, sehingga warga dapat melihat hasilnya di balai desa masing-masing dan ketika mendapati hasil yang tidak sesuai dapat mel-

porkan kembali ke aparat desa atau penghubung.

"Warga dapat melaporkan kondisi terakhir rumahnya sebelum tujuh hari setelah pengumuman keluar, ketika tidak sesuai akan dilakukan perbaikan data, contoh sebelum didata rusak sedang namun terjadi gempa susulan menjadi ambruk atau rusak berat," jelas Bupati.

Pendataan yang dilakukan bersama BNPB, menurut Bupati, termasuk sangat cepat karena kurang dari tiga bulan setelah bencana, pendataan sudah tuntas dilakukan dan warga dapat segera menerima bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya. (Ant)-f

KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI LUKAS ENEMBE

KPK Berpeluang Jerat dengan Pasal TPPU

JAKARTA (KR) - Proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe (LE) masih terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, terkait kasus tersebut KPK membidik sejumlah pihak yang diduga menerima aliran uang untuk diperiksa.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, langkah tersebut dilakukan, karena KPK menduga aliran uang korupsi yang menjerat LE telah berubah ke sejumlah aset maupun mengalir ke beberapa pihak.

"Karena itu, KPK terus menelusuri aliran uang dalam bentuk perubahan aset atau kemana diberikan kepada pihak lain setelah diterima tersangka," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (15/1).

Selain itu, Ali Fikri mengungkapkan tentang KPK membuka peluang menjerat LE dengan Pasal

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Untuk itu KPK akan mengembangkan kasus ini melalui pemeriksaan sejumlah saksi.

"Prinsipnya dalam proses empat bulan kemudian jika ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara LE dengan pasal lain maupun UU lain seperti TPPU, itu pasti kami lakukan," paparnya.

Namun, lanjutnya, kalau proses penyidikan empat bulan ke depan belum ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK membuka peluang

ang mengusutnya di proses persidangan. Pasalnya, KPK juga harus bergelut dengan waktu untuk segera merampungkan berkas penyidikan LE.

Untuk itu, jelas Ali, yang selalu KPK lakukan dalam proses penyidikan adalah mengembangkan. "Pada proses penuntutan maupun persidangan kami kembangkan dari fakta hukum. Ini ada waktu yang panjang saya kira, sehingga nanti diikuti prosesnya sampai proses persidangan," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Papua LE sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Penetapan sebagai tersangka ini bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Dalam kasus ini LE ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menerima suap. Sedangkan Rijatono

ditetapkan menjadi tersangka yang diduga sebagai pemberi suap. KPK mengatakan, LE diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono.

Suap itu diberikan, menurut KPK, karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua. Ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.

Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar. (Ful)-f

SENIN HARI INI DI PN SURABAYA

Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan

SURABAYA (KR) - Sidang perdana tragedi Kanjuruhan Malang dijadwalkan berlangsung, Senin (16/1) hari ini Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sidang perdana itu dengan agenda pembacaan dakwaan.

Untuk mengamankan situasi Kabag OPS Polrestabes Surabaya, AKBP Toni Kasmiri akan mengerahkan pasukan polisi untuk pengawalan dan pengamanan sidang tersebut.

Ia menyebutkan, bakal menerjunkan 800 personel untuk pengamanan di sekitar PN Surabaya dan seluruh exit tol sebagai pintu masuk Surabaya. "Seluruh titik-titik masuk ke Surabaya akan dilakukan penyekatan dan patroli," katanya, kemarin.

Pihaknya telah melakukan gladi bersih sebagai bentuk kesiapan pengamanan sidang tragedi Kanjuruhan. Pihak kepolisian juga dipastikan tidak memberikan izin digelarnya unjukrasa di sekitar area PN Surabaya.

Ia mengimbau Aremania untuk tidak datang dalam persidangan. "Kita meminta seluruh masyarakat baik Aremania maupun Bonek percayakan semua proses hukum yang berlaku dan tidak usah melakukan unjukrasa," tegasnya.

Untuk pengamanan PN Surabaya dilakukan tiga lapis yang dibagi dalam tiga ring, yakni ring dalam meliputi area dalam gedung PN Surabaya, ring 2 di depan Gedung PN Surabaya dan ring 3 di samping kanan dan samping kiri gedung PN Surabaya. (Obi)-f

DI KONGRES BIASA 2023

PSSI Tetapkan 11 Anggota KP dan KBP

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menetapkan masing-masing tujuh anggota Komite Pemilihan (KP) dan empat anggota Komite Banding Pemilihan (KBP) pada Kongres Biasa 2023 di Jakarta, Minggu (15/1). Untuk anggota KP yaitu Amir Burhanuddin, Sudarmadji, Ismu Duruhito, M Armisyam Latuconsina, Aulia Arief, Paska Sembiring dan Aditya Yando. Sementara anggota KBP adalah Gusti Randa, Aven Hinelo, Diego Saputra dan Joko Tetuko.

"Dengan demikian, PSSI menyerahkan semua tahapan menuju Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI 2023-2027 kepada KP dan KBP. Semua anggota KP dan KBP netral dari kepentingan PSSI serta keluarga sepak bola (football family)," ungkap Yunus.

Oleh karena itulah, Ketua KP Amir Burhanuddin cuti sementara dari jabatan Wakil Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur yang diembannya. Amir juga melepas status CEO klub Deltras FC sampai tugasnya sebagai KP tuntas. "Semua telah

menyatakan kesediaan untuk melepaskan diri dari kepentingan (terkait PSSI dan sepak bola-red)," kata Yunus.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta yang juga menjadi peserta Kongres PSSI memberikan dukungan pada dua calon yang banyak diharapkan memberikan perubahan bagi federasi sepakbola Tanah Air. Kedua calon yang akan mendapat dukungan tim berjudul 'Laskar Mataram' di kongres biasa kali ini yaitu Erick Tohir dan Ratu Tisha Destria.

CEO PSIM Yogyakarta Bima Sinung Widagdo mengatakan, dua calon yang mendapat dukungan PSIM ini diharapkan bisa menduduki posisi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Untuk posisi Ketua Umum, PSIM memberikan dukungannya pada Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan Ratu Tisha Destria diajukan PSIM menjadi wakil ketua.

Untuk posisi bakal calon Ketua PSSI untuk periode mendatang, selain Erick, calon lain yang sudah resmi mengajukan diri sebagai bakal calon adalah mantan Ketua PSSI periode lalu, La Nyalla Mattalitti. (Ant/Hit)-f

Stop Perkawinan Anak Demi Masa Depan Bangsa

JAKARTA (KR) - Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur selama tahun 2022 menerima sebanyak 191 permohonan anak menikah dini, dimana sebagian besar alasannya anak tersebut hamil dan melahirkan.

Dari 191 pemohonan dispensasi nikah yang masuk, rentang usia terbanyak 15-19 tahun yakni 184 perkara. Sisanya pemohon dispensasi nikah memiliki umur di bawah 15 tahun, sebanyak tujuh perkara.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) Femmy Eka Kartika Putri menyebut, provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi rentan mengalami pernikahan dini yang cukup tinggi juga.

"Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tentunya memiliki angka yang cukup tinggi terkait pernikahan usia dini, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan," jelas Femmy di Jakarta, Minggu (15/1).

Dikatakan, faktor penyebab pernikahan di bawah umur yaitu kehamilan sebelum pernikahan, tekanan sosial budaya, faktor ekonomi, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, serta pendidikan yang masih terbatas.

Maka dari itu, Femmy menegaskan, pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan sedini mungkin melalui peran aktif orangtua dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya.

Ia mengajak seluruh orangtua yang ada di Indonesia untuk selalu memberikan pendampingan dan mengedukasi anak-anaknya tentang bahaya pergaulan bebas saat ini. "Marilah seluruh orangtua di Indonesia dapat memberikan edukasi kepada anak-anaknya supaya mereka terhindar dari pergaulan bebas," tuturnya.

Selain itu, perlunya perhatian dari satuan pendidikan yang menjadi lingkungan kedua terdekat setelah keluarga melalui guru di sekolah dengan melakukan edukasi tentang bahayanya perkawinan anak.

"Sekolah dan orangtua harus punya

'bahasa' yang sama supaya anak-anak ini paham apa yang disampaikan kepada mereka terkait pernikahan dini," jelas Femmy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak semua pihak khususnya para orangtua untuk mencegah perkawinan anak guna menghindari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

"Perkawinan anak dikhawatirkan membawa dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kasus stunting atau kekerdilan pada anak yang nantinya dilahirkan hingga munculnya keluarga miskin baru," kata Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, suatu perkawinan membutuhkan kesiapan guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis, baik kesiapan lahir maupun batin. "Perkawinan anak dapat dikatakan jauh dari kesiapan. Misalkan kondisi fisik seorang perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dikhawatirkan kondisi fisiknya belum siap melahirkan. (Ati/Ant)-f

IJTIMA ULAMA NUSANTARA DITUTUP

Cak Imin Diminta Menangkan PKB di 2024

JAKARTA (KR) - Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat agar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memenangkan partai tersebut pada Pemilu Serentak 2024. Terutama dengan target 100 kursi di DPR RI.

"Memberikan mandat penuh kepada Gus Muhaimin dalam menentukan arah dan kebijakan PKB," kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di Jakarta, Sabtu (14/1).

Rekomendasi lainnya ialah Ijtima Ulama Nusantara akan menjadi forum yang mawadahi seluruh kiai dan nyai serta para dai di seluruh Indonesia yang peduli terhadap perpustakaan nasional. "Forum ini menjadi tempat bersilahturahmi, termasuk juga adu gagasan dan pikiran demi kemajuan Indonesia," tambahnya.

Anggota DPR RI itu juga menegakan semua peserta Ijtima Ulama Nusantara menjadi juru kampanye

nasional untuk pemenangan PKB. Forum juga akan terus mengawal program-program yang diperjuangkan oleh Fraksi PKB di DPR RI. "Forum merekomendasikan fraksi PKB di DPR mengawal undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak," jelasnya.

Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan agar PKB tetap memperjuangkan politik para kiai soal kemaslahatan, perlindungan terhadap anak, penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk juga transparansi keuangan negara. "Kami ingin menciptakan sebuah proses demokrasi yang kondusif," ujarnya.

Seperti diketahui, PKB menggelar Ijtima Ulama Nusantara di salah satu hotel di Jakarta, Jumat (13/1) dan Sabtu. Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB itu mengambil tema "Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia". Ijtima tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden

Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Wapres Ma'ruf Amin telah memberikan sinyal dukungan kepada Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024. Dukungan tersirat itu disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka Ijtima Ulama Nusantara di Jakarta.

"Sudah menjadi sinyal buat kami, kehadiran kiai Ma'ruf di forum ijtima ulama, termasuk statement bahwa ini saatnya yang muda, sudah cukup untuk menyimpulkan itu dukungan untuk Gus Muhaimin," katanya di Jakarta, Sabtu.

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq, yang menyebut Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan Ijtima Ulama menegaskan jika dia bagian dari PKB. "Ini bagian dari anak muda, bagian Gus Muhaimin dan bagi para kiai itu merupakan dukungan, walaupun tidak secara terbuka," ungkapnya. (Ant/Has)-f



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

DENDANG CALON GURU: Pengunjung mengamati karya pada pameran seni rupa Dendang Calon Guru #17 "Sajiwakala" di Taman Budaya Yogyakarta, Minggu (15/1). Pameran yang digagas mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu diikuti sekitar 100 perupa dari 11 Universitas di Indonesia yang menjadi ruang berhimpun dan berbagi pengalaman kehidupan para perupa.